

## TENAGA KERJA WANITA DALAM PERSPEKTIF GENDER DI NUSA TENGGARA BARAT

Bq. Ari Yusrini  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

[baiqyusrini@gmail.com](mailto:baiqyusrini@gmail.com)

**Abstract:** Gender is a concept that refers to a system of roles and relationships between women and men that are not determined by biological differences, but are determined by the social, political, and economic environment. In the preparation of this article, the author uses literature study method. Library study is used to extract information related to writing. The result of the research shows that in general the reason for being TKW; earning a great income, seeking work experience, finding a life partner, and becoming a foreign citizen. Another result indicates that the poverty factor is the main driving factor for women to become TKW as an effort to overcome the burden of family social economic burden. Social status in rural communities tends to be measured in terms of material, such as residence, vehicle, land area and other things.

**Keywords:** Women's Leadership, Domestic, Public, Worship

### **Pendahuluan**

Millenium Development Goals (MDGs) dideklarasikan pada bulan september tahun 2000, disepakati oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Dalam KTT tersebut seluruh perwakilan negara yang hadir sepakat untuk menurunkan proporsi penduduk yang pendapatannya kurang dari US\$ 1 per hari menjadi setengahnya antara periode 1990-2015.

Fokus utama dalam MDGs adalah pembangunan manusia, dengan meletakkan dasar pada konsensus dan kemitraan global untuk

pembangunan. Diharapkan, negara-negara yang lebih kaya dapat mendukung negara-negara miskin dan berkembang dalam melaksanakan tugas pembangunan mereka.

Tujuan MDGs adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menghapus kesenjangan gender. Untuk mencapai target tersebut, salah satunya dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan pendidikan dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan berwawasan gender sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender.

Beberapa permasalahan yang dialami keluarga secara umum didominasi oleh masalah sosial ekonomi masyarakat seperti perceraian, konflik antaranggota keluarga, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, dan lain-lain. Pembangunan ekonomi nasional selama ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator utamanya adalah tingginya ketimpangan dan kemiskinan. Ketimpangan gender yang masih terjadi di Indonesia, di antaranya ada pada pasar kerja, yaitu adanya akses perempuan terhadap kesempatan yang mendatangkan pendapatan lebih rendah daripada akses laki-laki. Perempuan lebih kecil kemungkinannya untuk bekerja, dan sebaliknya lebih besar kemungkinannya untuk tidak dipekerjakan. Perempuan cenderung mendapatkan upah lebih kecil daripada laki-laki.

Berdasarkan realitas yang terjadi, terdapat kemitraan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tahapan kemitraan, yang berbeda-beda dari satu keluarga ke keluarga lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya. Kemitraan gender ini tercermin dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya keluarga, meskipun belum tercapai kesetaraan yang sempurna. Namun demikian, masih

terjadi adanya ketimpangan gender atau ketidakseimbangan kemitraan gender yang sempurna di dalam tingkat masyarakat, yang dibuktikan dengan minimnya perempuan menduduki pengurus organisasi ekonomi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Organisasi perempuan yang ada umumnya adalah organisasi keagamaan dan perkumpulan sosial. Dalam hal ini, masih ditemui adanya kendala terhadap peran perempuan dalam berkontribusi pada kegiatan ekonomi dan sosial budaya. Belum terjadinya keseimbangan peran yang sempurna antara laki-laki dan perempuan, berkaitan dengan budaya masyarakat tradisional yang patriarkhi. Budaya tersebut menganggap bahwa laki-laki sebagai *a main/primary breadwinner*, dan perempuan sebagai *a secondary breadwinner*.

Pemisahan secara profesional, sebagai bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dalam tenaga kerja pasar. Masalah utama dengan fenomena ini adalah pembayaran ketidaksetaraan gender, dengan kelemahan di kedua evolusi individu dan sosial. Potensi perempuan sebagai profesional adalah tidak digunakan pada tingkat tertinggi dan, dengan demikian, pembangunan ekonomi dan sosial tidak dalam kecepatan yang tepat. Pendapat umum mengenai kesetaraan gender dalam dunia kerja adalah bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, sehingga disukai oleh banyak negara, terutama oleh nasional dan internasional undang-undang. Namun, teori tersebut jelas bertentangan dengan kenyataan, terjadi perbedaan pendapatan di pasar tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa segregasi profesional juga memiliki implikasi ekonomi yang mendalam.

Di sisi lain terjadi situasi yang paradoks: meskipun wanita sudah merasa dirugikan baik secara profesional dan finansial, banyak orang

yang sudah terintegrasi dan kontribusi dalam tenaga kerja pasar (perempuan, serta laki-laki), tetapi tidak ada yang menganggap kaum wanita telah didiskriminasi. Kesenjangan gender global masih sesuatu yg diinginkan baik untuk posisi manajerial dan semua pekerjaan lain dan sebutannya masing-masing. Kesimpulannya adalah salah satu yang paling sederhana: meskipun kebijakan legislasi dan kesetaraan dipimpin oleh pemerintah dan organisasi swasta, perempuan adalah satu-satunya yang menderita konsekuensi sehingga menghadapi dalam kesulitan dalam karir di level pemasukan, serta ketika datang untuk mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Begitu juga dengan masih banyaknya perempuan yang menjadi tenaga kerja ke luar negeri yang menggantikan peran laki-laki untuk mencari nafkah keluarga.

### **Terminologi Gender**

Gender adalah suatu konsep yang merujuk pada sistem peranan dan hubungannya antar perempuan dan lelaki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologi, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi<sup>1</sup>

Gender adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksikan secara sosial dalam suatu masyarakat<sup>2</sup>

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris. Yaitu 'gender' istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri fisik biologis. Dalam

---

<sup>1</sup> Anderson, Margaret L., *Thinking About Women : Sociologist and Feminist Perspectives*, Macmillan, New York, 1983.

<sup>2</sup> WHO, 2012, *What Do We Mean By "Sex and Gender"?*

ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley. Sebagaimana Stoller. Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia<sup>3</sup>

Analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol dan manfaat.

### **Praktik Budaya Masyarakat Terhadap Gender**

Ketimpangan gender yang terjadi diakibatkan karena masih kentalnya pandangan dalam masyarakat kita, bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang berbeda. Memiliki anak laki-laki dianggap lebih penting dan bernilai daripada anak perempuan. Anak laki-laki kelak diharapkan menjadi pemimpin bagi keluarga, tidak saja dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam semua lini (Jurnal Perempuan No. 44, Tahun 2005:23). Akibatnya prioritas dana keluarga akan selalu untuk pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuan. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan anak laki-laki, maka akan semakin tinggi pula nilai dan kedudukannya dalam masyarakat.

Dalam ranah kebudayaan, perempuan telah dipersepsi sebagai manusia domestik, yang ruang geraknya sangat terbatas. Tidak heran jika insiden kemiskinan dan buta huruf lebih banyak menimpa perempuan. Salah satu pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan

---

<sup>3</sup> Nugroho, Riant. *Gender dan Administrasi Publik; Studi tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

semua kerja yang dilakukan perempuan –baik kerja produktif, reproduktif, privat, dan publik- dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga, mulai dikenal sebagai pemberdayaan atau secara umum pendekatan *gender and development* (GAD) yang berkembang dari kritik terhadap perempuan dalam pembangunan/*woman in development* (WID). Pemberdayaan lebih terkait dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*) daripada pendekatan dari atas ke bawah (*top down*). Pendekatan ini melacak akar-akar subordinasi dalam ras, kelas, dan posisi (Mosse, 2007:210). Pendekatan ini memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal.

Pada fase selanjutnya, muncul pendekatan gender mainstreaming/ pengarusutamaan gender (PUG). Pendekatan ini mementingkan transformasi agenda pembangunan: paradigma pembangunan dan prioritasnya dipikirkan ulang, agenda sektoral dirubah, mekanisme akuntabilitas dan partisipasi ditingkatkan, melalui pemakaian analisis gender yang mampu memberikan data tentang ketidaksetaraan atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks setempat<sup>4</sup>. Dengan demikian, prioritas pembangunan secara otomatis akan muncul dan dikonsentrasikan pada sebab-sebab peminggiran perempuan dan komitmen untuk mengubah relasi sosial yang ada.

Fakta-fakta yang menunjukkan kesenjangan gender berkaitan dengan banyak faktor, antara lain : perilaku masyarakat yang lebih mementingkan pendidikan anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Faktor budaya juga berpengaruh, terutama pada pemilihan jurusan

---

<sup>4</sup> Jurnal Perempuan, No. 50 Tahun 2006. Pengarusutamaan Gender. H.11

oleh para peserta didik itu sendiri. Bila laki-laki lebih banyak memilih bidang ilmu keras (hard sciences) yang menyiapkan mereka menjadi tenaga produksi utama, maka perempuan lebih banyak memilih bidang-bidang ilmu perilaku, seperti pendidikan, psikologi, dan kesejahteraan sosial. Faktor lain yang juga memiliki pengaruh besar adalah mentalitas para pengelola dan pelaksana pendidikan yang masih berwarna laki-laki. Kultur birokrasi masih menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan, khususnya dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan<sup>5</sup>

Dalam setiap masyarakat, kaum laki-laki dan perempuan memiliki peran gender yang berbeda. Terdapat perbedaan pekerjaan yang mereka lakukan dalam komunitasnya, dan status maupun kekuasaan mereka di dalam masyarakat boleh jadi berbeda pula. Perbedaan jalan perkembangan peran gender dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari lingkungan alam, hingga cerita dan mitos-mitos yang digunakan untuk memecahkan teka-teki perbedaan jenis kelamin, mengapa perbedaan itu tercipta dan bagaimana dua orang yang berlainan jenis kelamin dapat berhubungan baik satu dengan yang lainnya dan dengan sumber daya alam di sekitarnya<sup>6</sup>.

Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial maupun kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan -seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan

---

<sup>5</sup> Kosasih dalam *Pikiran Rakyat*, 2004

<sup>6</sup> Mosse, Julia Cleves, *Gender and Development*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 5

gender dianggap sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Namun dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melakat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukan kodrat<sup>7</sup>.

Gender dan peran gender cenderung kurang menawarkan prestasi di semua lingkup kehidupan, kurangnya kesempatan terhadap kepemilikan kekayaan serta asset-aset lainnya, terhadap kekuasaan politik, pendidikan, kesehatan yang baik, dan penghidupan yang layak. Peran gender dikonstruksi dari tumpukan batu bata bangunan biologis dasar di mana kita semua dilahirkan, tetapi kelas, suku, warna kulit, agama, kasta, dan kebangsaan memiliki peranan vital dalam memutuskan secara tepat tentang kesempatan hidup, apa yang dimiliki perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki dengan latar belakang yang sama<sup>8</sup>

Persoalan budaya yang menghambat aktivitas pendidikan dan prestasi anak-anak perempuan maupun laki-laki harus dikaji secara mendalam. Praktek-praktek budaya seperti pemisahan dan pembedaan jenis kelamin seringkali menghalangi partisipasi anak-anak perempuan untuk bersekolah. Dalam banyak masyarakat, orang tua beranggapan bahwa menyekolahkan anak perempuan kurang menguntungkan dibandingkan menyekolahkan anak laki-laki. Bagaimana menghadapi norma budaya yang membuat perempuan tetap tertinggal?. Bagaimana cara mendorong orang tua untuk menyekolahkan anak-anak perempuan mereka. Sejumlah pertanyaan tersebut kiranya

---

<sup>7</sup> Fakhri, Mansoer. 2006. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. H. 6

<sup>8</sup> Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender and Development*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. H:5



memerlukan perenungan. Kesetaraan gender menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama. Kesetaraan gender berarti tidak mengakui dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam hal apapun. Kesetaraan gender berarti memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan seperti halnya pada laki-laki.

### **Tenaga Kerja Wanita**

Pada tahun 2003 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat pula aturan mengenai pekerja perempuan. Namun pada kenyataannya, penerapan UU Ketenagakerjaan tersebut belumlah maksimal. Implementasi undang-undang (UU) yang terhambat peraturan pelaksanaannya adalah salah satu dampak dari lemahnya pelaksanaan koordinasi antar instansi/ lembaga pemerintah.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan "Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja." dan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat."

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian "Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam

maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengertian tenaga kerja wanita adalah Seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

Jumlah pekerja perempuan di Indonesia semakin meningkat. Peran wanita dalam membangun ekonomi bangsa semakin diperhitungkan. Data yang penulis himpun menyebutkan bahwa jumlah pekerja perempuan di sebagian besar daerah di Indonesia lebih dari setengah jumlah pekerja laki-laki. Begitu pula dengan permintaan terhadap tenaga kerja perempuan yang jumlahnya tidaklah sedikit. Bahkan, secara keseluruhan jumlah tenaga kerja perempuan di Indonesia lebih banyak daripada laki-laki.

Maka dari itu pemerintah turut andil dalam membuat peraturan dan undang-undang yang dapat melindungi pekerja perempuan sehingga para pekerja perempuan tersebut mendapatkan hak-haknya secara adil serta merasa aman dan nyaman dalam bekerja

### **Kondisi TKW di NTB**

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah tenaga kerja wanita terbesar di NTB berasal dari Kabupaten Sumbawa sebesar 4,235 orang dari total keseluruhan sebesar 9,968 orang. TKW terendah berasal dari Kota Mataram sebesar 33 orang. Lebih lengkapnya digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel : Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Asal NTB Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Lombok Barat	4,202	351	4,553
Lombok Tengah	7,166	1,082	8,248
Lombok Timur	23,213	1,313	24,526
Sumbawa	102	4,235	4,337
Dompu	43	708	751
Bima	739	923	1,662
Sumbawa Barat	10	962	972
Lombok Utara	632	279	911
Kota Mataram	103	33	136
Kota Bima	9	82	91
Jumlah	36,219	9,968	46,187

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB., 2016

Ada berbagai faktor penyebab yang mendorong seseorang untuk menjadi orang yang bekerja di luar negeri meninggalkan tanah airnya. Menjadi Tenaga Kerja Wanita atau yang disingkat dengan sebutan TKW bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan tahapan-tahapan untuk bisa berangkat dan bekerja di negara asing dengan berbagai perbedaan budaya yang ada di dalamnya. Minimnya permintaan tenaga kerja di Indonesia salah satu penyebab banyak orang yang memutuskan untuk menjadi TKW baik secara legal maupun ilegal.

Secara umum alasan-alasan seseorang menjadi TKW sebagai berikut;

1. Mencari Penghasilan yang Besar

Pada umumnya penghasilan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) legal alias resmi di luar negeri cukup besar jumlahnya.

Apabila dibandingkan dengan penghasilan UMP (Upah minimum Provinsi) atau UMR (Upah Minimum Regional) di Indonesia, maka penghasilan seorang TKW mungkin bisa mencapai berkali-kali lipatnya. Namun demikian apabila para TKW tidak dapat menyesuaikan gaya hidupnya dengan biaya hidup di tempatnya bekerja yang pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan di kampung halamannya, maka penghasilan besar pun akan habis juga tanpa tersisa.

## 2. Mencari Pengalaman Kerja

Adalah sesuatu hal yang biasa, suatu lowongan pekerjaan yang memberikan penghasilan di atas UMP mensyaratkan pengalaman kerja satu tahun atau lebih di bidang yang sama. Hal ini tentu akan sulit sekali dipenuhi oleh orang-orang yang baru lulus sekolah atau kuliah dan juga orang-orang yang belum pernah bekerja di perusahaan resmi. Biasanya untuk menjadi seorang TKW, tidak dibutuhkan syarat pengalaman kerja karena sebelum diberangkatkan ke negara tujuan kerja, para TKW akan diberikan pelatihan yang akan memberi bekal keterampilan untuk bekerja sesuai dengan bidang keahlian profesi yang dipilihnya.

## 3. Mencari Pasangan Hidup

Bagi orang-orang yang belum menikah atau sudah menikah namun masing ingin menambah isteri, menjadi seorang TKW dapat memperbesar peluang seseorang untuk bisa mempunyai pasangan hidup seorang warga negara asing. Bentuk fisik orang-orang timur tengah, eropa, maupun amerika mungkin saja menjadi penyebab seseorang ingin mencari pasangan hidup di luar negeri. Bukan hal yang tidak mungkin seseorang nekat menjadi seorang TKW hanya karena ingin mencari pasangan hidup di luar negeri.

#### 4. Menjadi Warga Negara Asing

Orang-orang yang benci dengan Indonesia bisa saja ingin menjadi warga negara lain dengan cara menjadi TKI terlebih dahulu. Baru setelah dirasa mampu memenuhi persyaratan pindah kewarganegaraan maka orang tersebut akan berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara di tempatnya bekerja dan melepaskan kewargaan Indonesia yang dimilikinya.

#### **Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Gender**

Konstruksi sosial mempengaruhi keyakinan serta budaya masyarakat tentang bagaimana seharusnya lelaki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial. Perempuan seringkali dipandang sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya sehingga tidak mengherankan apabila segala aspek kegiatan baik dalam bidang politik, ekonomi maupun bidang lainnya selalu didominasi oleh kaum laki-laki. Perbedaan fisik dan psikis antara laki-laki dan perempuan turut menentukan fungsinya masing-masing dalam masyarakat, pada akhirnya pembagian fungsi tersebut mengarah pada pembagian kerja yang seringkali lebih menguntungkan laki-laki karena laki-laki dianggap memiliki fisik yang kuat. Perempuan tertinggal di seluruh bidang kehidupan publik apabila dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan diidentikkan dengan semua kegiatan yang bersifat domestik.

Sebuah kultur terkadang masih menempatkan wanita ke dalam posisi yang lebih rendah daripada pria. Sebagian besar masyarakat juga menganut pandangan umum bahwa jalan untuk menjadi maskulin atau feminin merupakan suatu yang alami akibat langsung dilahirkan secara biologis sebagai laki-laki atau perempuan. Masyarakat menciptakan

perilaku pembagian ini untuk menentukan berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai keharusan, untuk membedakan antara lelaki dan perempuan. Sudut pandang yang demikian inilah yang menyebabkan keterlibatan wanita sangat minim sekali. Tuntutan hidup yang semakin tinggi membuat perempuan harus ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Kebutuhan yang mendesak mampu mendobrak tradisi dan pandangan gender yang telah tertanam kuat di masyarakat. Hal tersebut juga dirasakan oleh para perempuan desa, dengan bekal latar belakang pendidikan formal yang rendah lapangan kerja yang didapat hanya sektor informal yakni sebagai pembantu rumah tangga. Beban ekonomi yang menghimpit memaksa para perempuan yang semula hanya sebagai ibu rumah tangga menjadi tenaga kerja di luar negeri. Perbandingan upah buruh yang sangat tinggi di Indonesia dan di luar negeri menjadikan profesi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagai alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Selama ini yang menjadi penyebab utama kepergian para perempuan bekerja ke luar negeri adalah faktor ekonomi, tetapi kenyataan di masyarakat suami juga memiliki andil yang sangat besar dalam pengambilan keputusan yang menentukan keterlibatan wanita sebagai pencari nafkah yang lebih dominan. Posisi dan peran suami yang seharusnya menjadi pencari nafkah primer dalam keluarga mulai tergantikan oleh keberadaan istri yang bekerja di luar negeri. Secara nominal pendapatan yang di peroleh oleh kedua pihak memang memiliki selisih yang sangat besar. Minimnya keterlibatan wanita dalam sektor pertanian berpijak pada satu asumsi bahwa pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga yang besar dan fisik yang kuat karena pekerjaan tersebut berkulat dengan tanah dan panas matahari. Para ibu

muda lebih memilih mencari alternatif pekerjaan lain yang dirasa lebih ringan dan tidak terlalu menguras tenaga seperti menjadi TKW.

Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan hidup yang semakin tinggi membuat wanita harus ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Kebutuhan yang mendesak mampu mendobrak tradisi dan pandangan genderitas. Perlu adanya sebuah alternatif yang mampu memecahkan persoalan ekonomi keluarga dan salah satu jalannya adalah menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri. Secara eksplisit di Indonesia telah terjadi ketimpangan yaitu antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak seimbang. Rendahnya penyerapan tenaga kerja bagi wanita menyebabkan para wanita berfikir untuk menjadi TKW ke luar negeri agar dapat membantu perekonomian keluarga. Setiap TKW memiliki alasan tersendiri yang melatarbelakangi keputusan mereka untuk bekerja ke luar negeri. Faktor pendorong tersebut beragam dari satu individu dengan individu yang lain, mulai dari faktor ekonomi maupun mencari pengalaman.

Adanya motivasi untuk mengubah nasib maupun adanya daya tarik upah yang relatif tinggi di luar negeri mengakibatkan banyak tenaga kerja (khususnya perempuan) rela menjadi tenaga kerja di luar negeri, bahkan perempuan yang sudah bersuami pun banyak yang menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Keputusan semacam ini diambil dengan harapan mampu membantu mencukupi kebutuhan keluarga yang selama ini masih kurang atau belum terpenuhi. Faktor kemiskinan menjadi faktor pendorong utama para perempuan menjadi TKW sebagai upaya mengatasi tekanan beban sosial ekonomi keluarga. Meskipun pekerjaan tersebut seringkali dipandang sebelah mata akan tetapi, pendapatan yang diperoleh mampu menunjang seluruh

kebutuhan keluarga bahkan meningkatkan status sosial di masyarakat. Status sosial di masyarakat desa cenderung diukur dari segi materiil, seperti tempat tinggal, kendaraan, luas tanah dan hal-hal lainnya. Semakin tinggi kualitas perekonomian maka status sosial di masyarakat pun akan mengalami perubahan ke arah yang lebih positif.

### **Penutup**

Secara umum alasan menjadi TKW; mencari penghasilan yang besar, mencari pengalaman kerja, mencari pasangan hidup, dan menjadi warga negara asing. Faktor kemiskinan menjadi faktor pendorong utama para perempuan menjadi TKW sebagai upaya mengatasi tekanan beban sosial ekonomi keluarga. Status sosial di masyarakat desa cenderung diukur dari segi materiil, seperti tempat tinggal, kendaraan, luas tanah dan hal-hal lainnya.

### **Daftar Pustaka**

- Alamu'ati, Kamal Jaudah Abu, *Wadifah Almar'ah fi Nazaril Islam*. Alqahirah: Darul Hadi, 1400/1980.
- Amin, KH. Ma'ruf dkk, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011
- Fatmawati, *Implementasi Hak-hak Politik perempuan dalam Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan: Studi pada Lembaga Legislatif Sulawesi Selatan*, (Disertasi: UIN Makassar, 2007.
- Al-Gazali, Muhammad, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW*. Bandung: Mizan, 1996.
- Hukum Keluarga; Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas., Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*, Cet. 2. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.



- Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mernissi, Fatima - Riffat Hasan, *Setara di hadapan Allah*, Cet.3. Yogyakarta:LSPPA, 2000.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Juz 5. Kairo: Dar al-Manar, 1367 H.
- Saekan dan Erniati Efendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Arkola, 1997.
- Al-San'ani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul al-Salam*, Jilid 2. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1379.
- Umar, Nasaruddin *Argumen Kesetaraan Jender dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, jilid 2, Cet. 3. Jakarta: Gema Insani, 2011.